

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen mereka dalam hal pengelolaan perusahaan. Teori agensi menggambarkan hubungan dua pihak yang saling terlibat dalam suatu hubungan pekerjaan, sesuai dengan pernyataan (Evans, 2017:38) dalam bukunya yang mengungkapkan bahwa:

” Agency Theory is based on the concept of an agency relationship, in which one party (the principal) engages another party (the agent) to perform work. Agency theory makes the assumption that individuals in agency relationships are utility maximizers and will always take actions to enhance their self interest. As a consequence, when authority is delegated to agents on behalf of the principal, agents may use this power to promote their own well being, at the expense of the principal. Monitoring is a central issue in agency theory, because it is a primary mechanism used by both parties to maintain and govern the relationship.”

Diterjemahkan oleh peneliti, sebagai berikut:

”Teori agensi didasarkan pada konsep hubungan agensi, dimana satu pihak (pelaku usaha) melibatkan pihak lain (agen) untuk melakukan pekerjaan. Teori agensi membuat anggapan bahwa individu dalam hubungan keagenan adalah pemaksimal utilitas dan akan selalu mengambil tindakan untuk meningkatkan kepentingan pribadi mereka. Sebagai konsekuensinya, ketika wewenang didelegasikan kepada agen atas nama prinsipal, agen dapat menggunakan kekuatan ini untuk mempromosikan kesejahteraan mereka sendiri, dengan mengorbankan prinsipal atau pelaku usaha. Pemantauan merupakan isu utama dalam teori keagenan, karena ini adalah mekanisme utama yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan dan mengatur hubungan.”

Tujuan perusahaan merupakan salah satu hal penting dalam manajemen keuangan. Hal ini dicapai dengan kemakmuran para investor yang diterjemahkan sebagai laba atau keuntungan perusahaan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak jarang manajer sebagai agen memiliki tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh principal maka idealnya mereka akan bertindak *on the best of interest of stakeholders*, tetapi dalam praktiknya sering terjadi konflik atau yang sering disebut *agency problem*. (Sartono Irfani, 2017)

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya kebijakan perusahaan terkait pajak. Investor sebagai principal mempunyai kepentingan untuk dapat memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi dan manajer ingin menekan pajak yang dibayarkan perusahaan melalui laba yang rendah. Maka dari itu, tindakan agresivitas pajak dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut (Khoiru & Martani, 2014). Dua kepentingan yang bertolak belakang inilah yang memicu perusahaan dengan melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dari sisi peraturan perpajakan yang telah disusun oleh pemerintah (*tax avoidance*) (Hutabarat & Yuliati, 2023).

2.1.2 Teori Stakeholder (*Stakeholders Theory*)

Stakeholder theory mengatakan bahwa kinerja sebuah organisasi dipengaruhi oleh semua *stakeholder* organisasi, oleh karena itu merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan untuk memberikan keuntungan kepada semua *stakeholder*

yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi (Donaldson & Preston, 1995). *Stakeholder theory* menjelaskan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham saja, melainkan juga untuk semua stakeholder lainnya seperti, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lainnya, (Ghozali & Chariri, 2007). Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan para *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007).

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemiliknya, sedangkan yang dinamakan *stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi tujuan umum dari suatu organisasi, termasuk kelompok yang dianggap tidak menguntungkan (*adversarial-group*) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator. Pemerintah sebagai regulator merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah, misalnya terkait dengan pembayaran pajak negara.

Perusahaan diharapkan mampu bertanggung jawab kepada pemerintah dengan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*, taat dalam membayar pajak dan mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Manajer perusahaan dapat saja melakukan tindakan *tax avoidance* dalam upaya mengoptimalkan laba perusahaan dengan mengorbankan *stakeholder* lainnya, dalam hal ini tidak hanya pemerintah saja yang dirugikan namun masyarakat juga secara tidak langsung telah dirugikan dengan adanya tindakan tersebut. Meskipun demikian, *stakeholder* pasti akan menanggapi

tindakan manajemen perusahaan yang merugikan sehingga *stakeholder* tidak akan memberikan dukungan kepada perusahaan tersebut akibat praktik *tax avoidance* yang dilakukan, nantinya akan mengancam keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan hal yang tidak bertanggung jawab, dan hal tersebut tidak sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyebutkan bahwa perusahaan harus selalu mencari dukungan dari *stakeholdernya*.

2.1.3 Akuntansi

2.1.3.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan (Kartikahadi et al., 2019:3).

Akuntansi adalah "... *an information system that measures business activity, processes data info report and communications result to decision makers.*" Yang artinya akuntansi adalah system informasi yang mengukur kegiatan bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Charler T & Harrison, 2011:3).

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut (Pura, 2013:4).

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan aktivitas maupun

transaksi ekonomi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan, untuk diberikan kepada pemilik kepentingan guna membantu pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut (Pura, 2013:7), bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 8 (delapan) macam, yaitu:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan bersifat serbaguna (*general purpose*)

2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan atau manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.

4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)

Adalah bidang yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan keuangan yang dibuat agar bisa lebih dipercaya secara objektif.

5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Adalah bidang akuntansi yang melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)

Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan Negara.

8. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain.

Dalam penelitian ini bidang kajian akuntansi yang akan diteliti adalah bidang akuntansi perpajakan (*Tax Accounting*).

2.1.4 Akuntansi Perpajakan

Menurut (Agoes & Trisnawati, 2013:10) akuntansi pajak adalah

”... bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak wajib pribadi dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Menurut (Waluyo, 2014:30) akuntansi pajak adalah:

”... menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang peraturan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Akuntansi pajak adalah proses menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Agoes & Trisnawati, 2013:10).

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah proses pencatatan dan penghitungan yang didasarkan kepada laporan keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Akuntansi perpajakan disini membantu baik perusahaan ataupun pemerintah untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan untuk mempermudah dalam penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT).

2.1.5 Laporan Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2018:7). Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu Perusahaan (Munawir, 2014:2).

Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai gambaran dari kinerja keuangan sebuah Perusahaan dalam periode tertentu yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil Keputusan.

2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut (Kartikahadi et al., 2019:126) adalah:

”Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas.”

Menurut IAI dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) (2016:4), tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi;
2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan;

3. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*Stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.1.5.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 24-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan demi tujuan mencapai hasil tertentu.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.6 *Leverage*

2.1.6.1 Pengertian *Leverage*

Menurut (Kasmir, 2018:151) definisi rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah:

”Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai seluruh kewajibannya.

Sedangkan menurut (Fahmi, 2013:127) definisi *leverage* adalah:

”rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme *leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.”

Leverage atau *financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100% (Sartono Irfani, 2017:121).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan aktivasnya.

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Penghitungan rasio *leverage* memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. berikut ini adalah beberapa tujuan dan manfaat dengan menggunakan rasio *leverage*.

Menurut (Kasmir, 2018:153), tujuan perusahaan menggunakan *leverage* ratio diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan:
8. Tujuan lainnya.

Adapun manfaat perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut (Kasmir, 2018:153) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih. Ada terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan;
8. Manfaat lainnya.

2.1.6.3 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah rasio solvabilitas. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau rasio *leverage* disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan *leverage* secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas diantaranya sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Menurut (Sartono Irfani, 2017:121) pengertian *debt ratio* adalah:

“*Debt Ratio* menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai oleh seluruh krediturnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga akan menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.”

Menurut (Kasmir, 2018:156) pengertian *debt ratio*:

”*Debt ratio* merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”. Rumus untuk menghitung *debt ratio* adalah:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Menurut (Kasmir, 2018:158) *debt to equity ratio* adalah:

“Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.” Rumus untuk menghitung *debt to equity ratio* adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal (Equity)}}$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

Menurut (Sartono Irfani, 2017:121), *time interest earned ratio* adalah:

“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga”. Rumus untuk menghitung *time interest earned ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

4. Fixed Charge Coverage Ratio

Menurut (Sartono Irfani, 2017:122) *fixed charge coverage ratio* adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivitya dari perusahaan lising dan harus membayar angsuran tertentu”.

Rumus untuk menghitung *fixed charge coverage ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed Charge Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Pembayaran Sewa}}{\text{Bunga} + \text{pembayaran Sewa}}$$

5. Debt Service Coverage

Debt Service Coverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama seperti rasio Leverage yang lain, hanya dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman (Sartono Irfani, 2017:122).

$$\text{Debt Service Coverage} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Bunga} + \text{Sewa} + \frac{\text{Angsuran Pokok Pinjaman}}{(1 - \text{tarif pajak})}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran rasio *leverage* diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan *debt to asset ratio* (DAR) dalam menentukan tingkat *leverage*.

2.1.7 Likuiditas

2.1.7.1 Pengertian Likuiditas

Menurut (Kasmir, 2018:130) definisi likuiditas adalah:

”Rasio likuiditas atau sering disebut dengan nama rasio modal kerja, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek).”

Menurut (Fahmi, 2013:65) pengertian likuiditas adalah:

”Kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contoh: membayar listrik, telepon, air, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon, dan sebagainya. Karena itu rasio likuiditas sering disebut dengan *short term liquidity*.”

Likuiditas atau rasio likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melunasi utang-utang yang segera harus dibayar (*current liabilities*) dengan menggunakan utang lancarnya. Dalam hal ini, semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan maka kinerjanya dianggap semakin baik. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi biasanya memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan berbagai dukungan dari banyak pihak, misalnya: lembaga keuangan, kreditur, maupun pemasok. Pada umumnya, tingkat liabilities suatu perusahaan ditunjukkan dalam angka-angka tertentu, seperti: angka rasio cepat, angka rasio lancar dan angka rasio kas.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola kebutuhan keuangan jangka pendeknya, khususnya bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya

(*current liabilities*). Likuiditas dipandang sebagai salah satu ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.

2.1.7.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Penghitungan rasio likuiditas ini cukup memberi manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak dalam maupun luar perusahaan. Selain itu adapula tujuan dari perhitungan rasio likuiditas. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas menurut (Kasmir, 2018:131) yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan Perusahaan membayar kewajiban jangka pendek.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan.
3. Untuk mengukur kemampuan atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
4. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
5. Untuk mengukur seberapa besar perputaran kas.
6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya.
8. Sebagai alat bagi pihak luar terutama yang berkepentingan terhadap perusahaan dalam menilai kemampuan perusahaan agar dapat meningkatkan saling percaya.

2.1.7.3 Metode Pengukuran Rasio Likuiditas

Menurut (Kasmir, 2018:134) jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio Likuiditas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasio lancar (*Current Ratio*)
Rasio Lancar (*Current Ratio*) adalah rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Perhitungan *current ratio* menurut (Kasmir, 2018:134) adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test*)

Quick Ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi, membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Perhitungan *quick ratio* atau *acid test* menurut (Kasmir, 2018:135) adalah sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Cash Ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Perhitungan *Cash Ratio* menurut (Kasmir, 2018:138) adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

Dari beberapa jenis rasio likuiditas yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini peneliti menggunakan rasio lancar (*current ratio*) dalam mengukur rasio likuiditas, karena rasio lancar dapat mengukur seluruh total kekayaan perusahaan dengan jumlah uang likuid yang tersedia dalam perusahaan, baik untuk operasional maupun untuk membayar utang jangka pendek.

2.1.8 Profitabilitas

2.1.8.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2018:198) profitabilitas merupakan:

”Rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam Perusahaan. Profitabilitas juga merupakan suatu ukuran yang efektif bagi manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri”

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Ketika perusahaan memiliki keuntungan yang rendah atau bahkan merugi, maka pajak yang dibayarkan akan lebih rendah atau bahkan terhindar dari pembayaran pajak. Perusahaan dapat menggunakan kompensasi kerugian untuk mengurangi pajak untuk tahun buku baik sebelumnya atau tahun berikutnya (Kristian et al., 2022).

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Dapat disimpulkan rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya, dan juga rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan.

2.1.8.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas mempunyai tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut (Kasmir, 2018:199-200), yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dari profitabilitas menurut (Kasmir, 2018:200) adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan.
3. Mengetahui perkembangan laba dari tahun ke tahun.
4. Mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari semua dana perusahaan yang telah digunakan baik dari utang ataupun ekuitas.

2.1.8.3 Jenis-jenis Pengukuran Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2018:201-209) jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

1. *Profit Margin on Sales*

Profit Margin on Sales atau rasio profit margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk margin laba kotor dengan rumus:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

b. Untuk margin laba bersih dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

2. *Return on Investment (ROI)* atau *Return on Assets (ROA)*

Return on Investment (ROI) atau *Return on Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam Perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran yang efektif bagi manajemen dalam mengelola investasinya. Rumus untuk mencari ROI/ROA yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROI/ROA} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Total Asset}}$$

3. *Return on Investment (ROI)* dengan pendekatan *Du Pont*

Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan du pont adalah sama. Cara mencari hasil pengembalian investasi dengan pendekatan du pont:

$$\text{ROI} = \text{Margin Laba Bersih} \times \text{Perputaran Total Aktiva}$$

4. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Untuk mencari *return on equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Equity}}$$

5. *Return on Equity* (ROE) dengan Pendekatan Du Pont

Hasil yang diperoleh antara cara seperti diatas dengan pendekatan du pont adalah sama. Untuk mencari hasil ROE dengan pendekatan du pont, yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \text{Margin Laba Bersih} \times \text{Perputaran Aktiva} \times \text{Pengganda Ekuitas}$$

6. *Earning per Share Common Stock*

Earnings per Share Common Stock merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rumus untuk mencari *earning per share common stock* adalah sebagai berikut:

$$\text{Earning per share common stock} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa Yang Beredar}}$$

Indikator yang dipakai peneliti dalam mengukur profitabilitas yaitu *return on assets* (ROA) dengan cara membagi *earning after interest and tax* (EAIT) dengan *total assets*. ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran yang efektif bagi manajemen dalam mengelola investasinya.

Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini

digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Rumus untuk mencari ROA yaitu sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Total Asset}}$$

2.1.9 Pajak

2.1.9.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

”... kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Agoes & Trisnawati, 2013:6) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

”... iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak adalah iuran wajib berupa uang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2014:2).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, tetapi digunakan untuk

pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

2.1.9.2 Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur):

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti PPH, PPN, PPnBM, PBB dan sebagainya

2. Fungsi Pengatur (*Reguler*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu PPnBM, pajak progresif, pajak ekspor dan sebagainya.

Fungsi tersebut merupakan peran utama pajak, dalam perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih luas dengan adanya fungsi retribusi dan demokrasi. Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinggi. Fungsi demokrasi merupakan salah satu penjelmaan atau wujud dari sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya

pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka timbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

2.1.9.3 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut (Mardiasmo, 2019:2) jenis pajak yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, lalu Pajak Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.9.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019:2), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.10 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.1.10.1 Pengertian *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah “... *Tax Avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal.*” Setelah diterjemahkan artinya adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi besarnya nilai pajak explicit (pajak yang secara langsung dibayarkan kepada otoritas perpajakan) melalui perencanaan pajak yang secara teknis legal dan ilegal (Hanlon & Heitzman, 2010:137).

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak dengan tujuan meringankan beban pajak yang dikenai dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mardiasmo, 2019:11).

Menurut (Pohan, 2013:23) pengertian *Tax Avoidance* adalah:

“*Tax Avoidance* adalah strategi dan Teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.”

Umumnya pajak menjadi sumber penerimaan negara, namun pungutan pajak terkadang tidak selalu diindahkan oleh wajib pajak. Hal ini karena pajak dengan tarif tertentu merupakan pengurang dari penghasilan wajib pajak. Maka dari itu, wajib pajak sering kali berupaya untuk mengurangi beban pajak melalui penghindaran pajak. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan memanfaatkan kelonggaran dari suatu ketentuan undang-undang perpajakan.

2.1.10.2 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut (Hanlon & Heitzman, 2010:140) ada dua belas teknik pengukuran penghindaran pajak yang digunakan di dunia. Teknik pengukuran tersebut akan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode Pengukuran	Rumus	Keterangan
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total expense per dollar of pre-tax income
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sun of cash taxes paid over by the sum of pre-tax
<i>ETR Differential</i>	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	The difference of between the statutory ETR an firm's GAAP ETR
<i>DTAX</i>	Error term from the following regression: $\text{ETR differ} - \text{Tax book income} = a + bx \text{ control} + e$	The unexplains portion of the ETR differential
<i>Total BTD</i>	$\text{Pre – tax book income} - \frac{(\text{U.S CTE} - f \text{ gn CTE})}{(\text{U.S.STR})} - (\text{NOLt} - \text{NOLt} - 1)$	The total difference between book and taxable income
<i>Temporary BTD</i>	$\frac{\text{Deferred tax expense}}{(\text{U.S.STR})}$	The total difference between book and taxable income
<i>Abnormal BTD</i>	$\frac{\text{Residual from BTD}}{\text{TAit}} + mi$	A measure of unexplained total book – tax difference
<i>Unrecognized tax benefits</i>	Disclosed amount post – FIN 48	Tax liability accrued for taxes not yetpaid on uncertain position
<i>Tax Shelter activity</i>	Indicators variable for firms accused of engaging a taxshelter	Firms identified via firm dislosure,

Metode Pengukuran	Rumus	Keterangan
		<i>the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash tax paid}}{\text{TAitWorldwide total pre – Tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre – tax book income</i>

Sumber: (Hanlon & Heitzman, 2010)

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menghitung *tax avoidance* adalah menggunakan *cash effective tax rate* terhadap laba sebelum pajak. Maka pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) adalah:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi perusahaan melakukan *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alvin Prambudi, Ardan Gani Assalam (2021)	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Capital Intensity</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi kasus perusahaan Sub sektor Otomotif yang	Variabel Independen: <i>Transfer Pricing, Capital Intensity, Profitabilitas</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Secara parsial <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax</i>

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		terdaftar di BEI tahun 2013-2019)		<i>Avoidance</i> , Sedangkan Profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2	Angelia Cindy Ramanata (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan Likuiditas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Variabel Independen: <i>Leverage</i>, Profitabilitas, Likuiditas</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	Berdasarkan penelitian ini variabel <i>Leverage</i> dan variabel Likuiditas sama sama memberikan pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan variabel Profitabilitas disimpulkan tidak memberikan pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	Fitriyatul Khasanah, Fany Indriyani (2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderating	<p>Variabel Independen: <i>Leverage</i>, Likuiditas, <i>Capital Intensity</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Moderasi: Komite Audit</p>	Secar parsial variabel <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , variabel likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan variabel <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif dan tidak

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Variabel moderasi yaitu komite audit mampu memoderasi pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas serta <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Ilham Hidayah Napitulu, Anggiat Situngkir, Chairunnisa Arfani (2020)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Variabel Independen: <i>Transfer Pricing</i>, Profitabilitas</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	Berdasarkan hasil penelitian ini variabel <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel <i>Tax Avoidance</i> .
5	Devi Theresia, Salikim (2023)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)	<p>Variabel Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	Variabel Likuiditas dengan <i>Current Ratio</i> (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Variabel <i>Leverage</i> dengan <i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) berpengaruh negatif signifikan

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>terhadap <i>Tax Avoidance</i>, variabel profitabilitas dengan Return on Asset (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan variabel Ukuran Perusahaan dengan (SIZE) berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>
6	Robby Krisyadi, Efri Mulfandi (2021)	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p>Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, Intensitas Modal</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<p>Penelitian ini berkesimpulan bahwa variabel <i>Leverage</i> dan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran Pajak, sementara variabel Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak.</p>
7	Mikhael Kristian Natalel Kanatalo, Devica Pratiwi (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak	<p>Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i>, <i>Inventory Intensity</i></p>	<p>Berdasarkan penelitian ini variabel Profitabilitas berpengaruh</p>

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Negatif terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan variabel <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
8	Dimas Anindyka S, Dudi Pratomo, S.E.T, Kurnia, S.AB.,M.M (2018)	Pengaruh <i>Leverage (DAR)</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015)	Variabel Independen: <i>Leverage (DAR)</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan penelitian ini variabel <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan variabel <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan variabel <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9	Ikhsan Abdullah (2020)	Pengaruh Likuiditas dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: Likuiditas, <i>Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan hasil penelitian ini variabel likuiditas dengan current ratio berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan variabel <i>Leverage</i>

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10	Sita Shofiyatus Sholihah (2024)	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak (studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2022)	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Berdasarkan hasil penelitian ini variabel profitabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan variabel <i>Leverage</i> tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
11	Sari Wahyu Utami, Siti Alliyah (2023)	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Berdasarkan hasil penelitian ini variabel likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , semakin tinggi likuiditas maka <i>Tax Avoidance</i> semakin tinggi. Variabel <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan variabel profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan.

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Nur Afi Yunita, Muhammad Yusra, Arliansyah (2022)	Pengaruh Intensitas Modal, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : Intensitas Modal, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> , variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Variabel <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan ”kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Tax Avoidance merupakan usaha *taxpayers* (wajib pajak) dalam mencegah tingginya pajak terutang yang dilakukan secara sah menurut hukum dengan cara tidak melanggar atau mencari kelemahan undang-undang perpajakan. *Tax Avoidance* seringkali dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran beban pajak dengan nominal yang besar, yang akan mengurangi laba perusahaan, untuk itu manajemen perusahaan cenderung melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan undang-undang perpajakan.

Untuk menemukan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, peneliti memilih *cash effective tax rate* (CETR) sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek, yang akan digunakan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan CETR tidak mudah terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi penyisihan nilai atau perlindungan pajak, sehingga baik digunakan untuk menggambarkan secara keseluruhan kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Kerangka penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu *leverage*, likuiditas dan profitabilitas terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*, penjelasan dari kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Kasmir, 2018:151) definisi rasio *leverage* adalah:

”Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai seluruh kewajibannya.

Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi menunjukkan bahwa perusahaan bergantung pada pinjaman luar Perusahaan atau utang, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki tingkat utang yang tinggi, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu mengolah aset yang dimiliki. Jumlah *leverage* dalam suatu Perusahaan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan (Krisyadi & Mulfandi, 2021).

Menurut (Fahmi, 2013:127):

”Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.”

Menurut (Yunita et al., 2022) :

”*Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena utang jangka panjang memiliki tingkat bunga yang cukup besar sehingga resiko yang dimiliki perusahaan besar, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut salah satunya akan mempengaruhi keseimbangan modal perusahaan, untuk mencegah berkurangnya modal

perusahaan, maka perusahaan akan berupaya melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu melakukan *Tax Avoidance*.”

Semakin tinggi nilai dari *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula resiko yang timbul dari utang tersebut. Akibatnya hal ini dapat memicu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Yunita et al., 2022), (Abdullah, 2020) dan (Krisyadi & Mulfandi, 2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anindyka et al., 2018) disebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Kasmir, 2018:130) definisi likuiditas adalah:

”Rasio likuiditas atau sering disebut dengan nama rasio modal kerja, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek).”

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan dalam keadaan yang sehat (Suyanto & Supramono, 2012).

Menurut (Utami & Alliyah, 2023):

”Perusahaan yang lebih likuid cenderung lebih agresif dalam upaya untuk mengurangi beban pajak, dikarenakan perusahaan tersebut memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengeksploitasi celah-celah hukum perpajakan. Likuiditas yang tinggi maka tingkat tingkat *Tax Avoidance* menjadi tinggi dikarenakan perusahaan mementingkan aset lancar daripada membayar pajak yang tinggi.”

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Alliyah, 2023) dan (Abdullah, 2020) yang menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yunita et al., 2022) disebutkan bahwa tidak ada pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Kasmir, 2018:198) profitabilitas merupakan:

”Rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam Perusahaan. Profitabilitas juga merupakan suatu ukuran yang efektif bagi manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri”

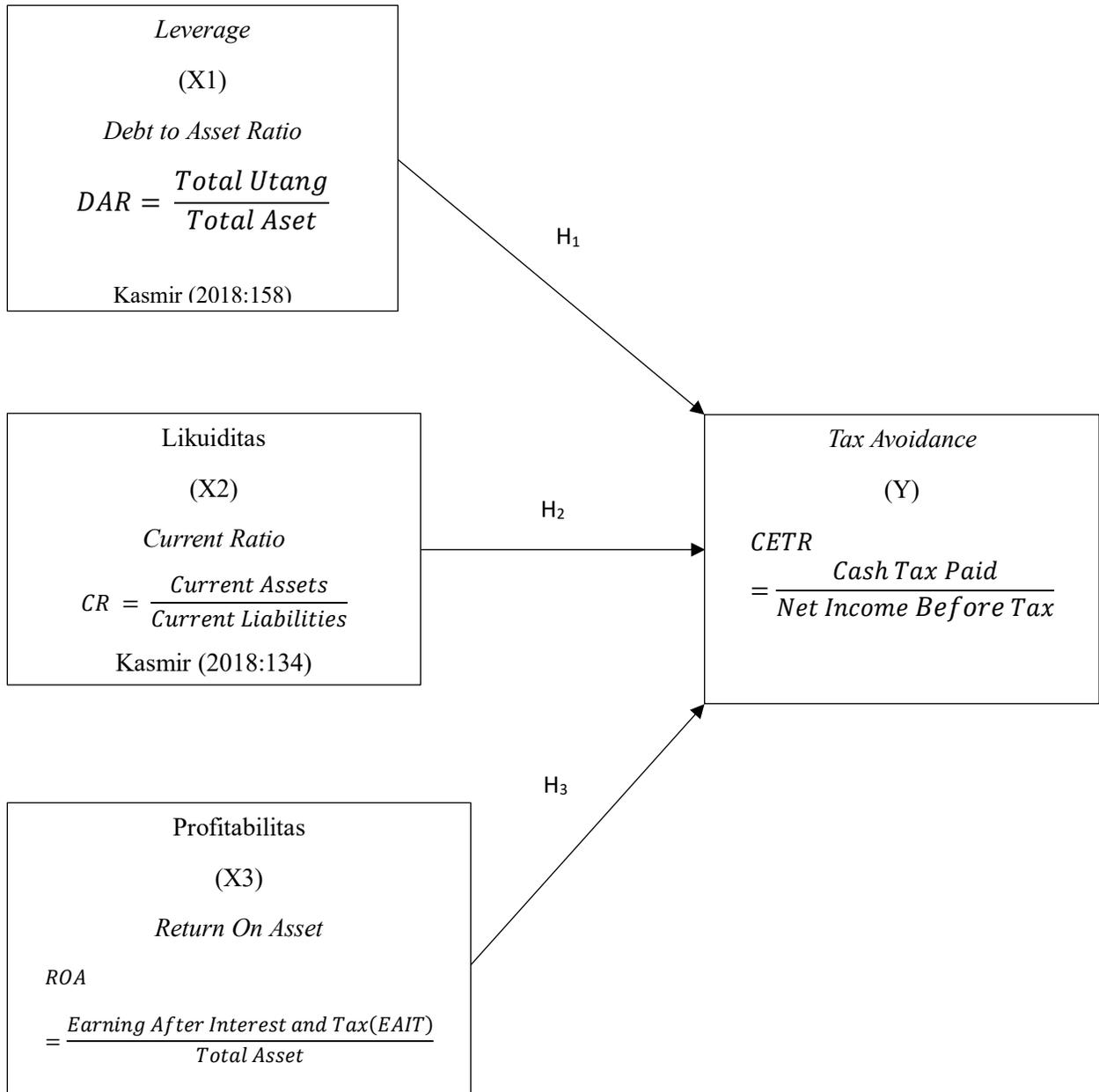
Ketika Perusahaan memiliki keuntungan yang rendah atau bahkan merugi maka pajak yang dibayarkan akan lebih rendah atau bahkan terhindar dari pembayaran pajak. Perusahaan dapat menggunakan kompensasi kerugian untuk mengurangi pajak untuk tahun buku baik sebelumnya atau tahun berikutnya (Kristian et al., 2022)

Menurut (Napitupulu et al., 2020):

”Laba yang besar akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *Tax Avoidance*.”

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Prambudi & Asalam, 2021) dan (Krisyadi & Mulfandi, 2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramanata, 2022) menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang perlu dibuktikan, karena hipotesis baru didasarkan pada teori dan bukan pada fakta empiris melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2020). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: "Pengaruh *leverage*, likuiditas dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*" adalah sebagai berikut:

$H_1 = \text{Leverage}$ berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

$H_2 = \text{Likuiditas}$ berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

$H_3 = \text{Profitabilitas}$ berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.